



PERJANJIAN KINERJA



**TAHUN
2026**

BAPPERIDA KABUPATEN SERUYAN

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala Rahmat dan HidayahNya, sehingga dokumen Perjanjian Kinerja (PK) BAPPERIDA Kabupaten Seruyan Tahun 2026 ini dapat tersusun.

Dokumen ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan. Penyusunan Dokumen ini berpedoman pada Rencana Kerja Bapperida Kabupaten Seruyan Tahun 2026 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bapperida Kabupaten Seruyan Tahun 2026 yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan misi ke 3 pada RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 yaitu **“Mewujudkan Pemerataan Pembangunan, Kemandirian Desa dan Inovasi Layanan Publik”** dengan sasarannya yaitu **“Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah”**.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja BAPPERIDA Kabupaten Seruyan Tahun 2026. Kami berharap agar dokumen ini dapat bermanfaat bagi seluruh aparatur BAPPERIDA Kabupaten Seruyan, maupun seluruh pihak terkait.

Kuala Pembuang, 20 Pebruari 2026
Kepala,


AGUNG SETIAWAN, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19790920 199810 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Struktur Organisasi BAPPERIDA	5
1.5. Sistematika Penulisan	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	17
BAB III PENUTUP	70

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan landasan utama dan pegangan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam rangka meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur. Salah satu konsekuensi ditetapkannya Peraturan Presiden tersebut adalah diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah. Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (**outcome**) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup **outcome** yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) BAPPERIDA Kabupaten Seruyan ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran

- Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 80, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 93);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 69, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 98);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 (Lembar Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 Nomor 72, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 101);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 Nomor 76, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 105);
 21. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 44 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
 22. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 21 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 Nomor 21);
 23. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 26 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 Nomor 26);
 24. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 Nomor 39);
 25. Keputusan Bupati Seruyan Nomor 100.3.3.2/304/2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perjanjian Kinerja ini adalah sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.

Tujuan dari penyusunan Perjanjian Kinerja ini adalah untuk menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan/sasaran perangkat daerah juga sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

1.4. Struktur Organisasi BAPPERIDA

Berdasarkan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 44 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Seruyan adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan

BAPPERIDA Kabupaten Seruyan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Seruyan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan serta merupakan unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan Tipe A. BAPPERIDA Kabupaten Seruyan mempunyai tugas membantu Bupati:

- a. Mengkoordinasikan, mensinergikan, dan mengharmonisasikan penyusunan rencana pembangunan daerah;
- b. Melakukan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah meliputi: pengendalian terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan rencana pembangunan daerah, dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah; dan
- c. Menyelenggarakan kewenangan dan tanggung jawab atas riset dan inovasi pemerintahan dalam negeri di daerah.

2. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Badan terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - i. Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan; dan

- ii. Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - d. Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, dan Kewilayahan;
 - e. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, dan Infrastruktur;
 - f. Bidang Riset Dan Inovasi Daerah; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Tugas dan Fungsi
- a. Kepala Badan
- Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan, pengendalian, dan pengevaluasian pelaksanaan rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan riset dan inovasi daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut
- a) Penyusunan rencana pembangunan daerah;
 - b) Pelaksanaan verifikasi rencana perangkat daerah;
 - c) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah;
 - d) Pelaksanaan evaluasi laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan rencana perangkat daerah;
 - e) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah;
 - f) Pelaksanaan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah dan hasil evaluasi rencana perangkat daerah;
 - g) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan riset dan inovasi di pemerintahan daerah;
 - h) Pemberian dan penerbitan rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Bupati dan perangkat daerah serta melakukan pendampingan penelitian bagi warga Negara Indonesia/asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang, dan meminta laporan atas hasil penelitian;

- i) Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja serta Anggaran Badan;
 - j) Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Badan;
 - k) Penyelenggaraan urusan kesekretariatan Badan; dan
 - l) Pelaksanaan tugas lain yang terkait fungsi Badan.
- b. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan perencanaan dan pelaporan, keuangan, kepegawaian, dan barang milik daerah pada Badan serta memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di Lingkungan Badan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Perumusan dan perencanaan kegiatan program kerja Sekretariat;
- b) Pengoordinasian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Badan;
- c) Pengoordinasian administrasi keuangan Badan;
- d) Pengoordinasian Administrasi Barang Milik Daerah Badan;
- e) Pengoordinasian Administrasi Kepegawaian Badan;
- f) Pengoordinasian Administrasi Umum Badan;
- g) Pengoordinasian pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Badan;
- h) Pengoordinasian penyediaan jasa penunjang urusan Badan;
- i) Pengoordinasian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Badan;
- j) Penilaian dan pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- k) Pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

Sekretariat, terdiri atas:

1. Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas pengoordinasian, penyiapan penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD, serta penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaannya, data dan informasi, pelaporan serta hasil-hasil pelaksanaan pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a) Perumusan dan pengoordinasian penyusunan rencana pembangunan daerah;
- b) Perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan verifikasi rencana perangkat daerah;
- c) Perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah;
- d) Perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan evaluasi laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan rencana perangkat daerah;
- e) Perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan daerah dan penyusunan rencana perangkat daerah;
- f) Perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah dan hasil evaluasi rencana perangkat daerah;

- g) Pengoordinasian, sinkronisasi, penatausahaan dan pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- h) Penyusunan dan penyajian data dan informasi serta pemberian dan penerbitan rekomendasi regulasi dan kebijakan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah kepada KepalaBadan;
- i) Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja serta Anggaran Bidang Perencanaan, Pengendalian dan EvaluasiPembangunan Daerah;
- j) Pengelolaan kepegawaian dengan merumuskan, memeriksa dan menetapkan penilaian kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- k) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas fungsi Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; dan
- l) Pelaksanaan tugas lain yang terkait fungsi Bidang Perencanaan,Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

d. Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan

Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, dan Kewilayahan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a) Penyusunan rencana pembangunan daerah Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan;
 - b) Pelaksanaan verifikasi rencana perangkat daerah Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan;
 - c) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan;
 - d) Pelaksanaan evaluasi laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan rencana perangkat daerah Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan;
 - e) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan daerah penyusunan rencana perangkat daerah Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan;
 - f) Pengoordinasian, sinkronisasi, penatausahaan dan pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan;
 - g) Pemberian dan penerbitan rekomendasi regulasi dan kebijakan Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan;
 - h) Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja serta Anggaran Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan;
 - i) Pengelolaan kepegawaian dengan merumuskan, memeriksa dan menetapkan penilaian kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan;
 - j) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas fungsi Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan; dan
 - k) Pelaksanaan tugas lain yang terkait fungsi Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan.
- e. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur
- Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di

bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a) Penyusunan rencana pembangunan daerah Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur;
- b) Pelaksanaan verifikasi rencana perangkat daerah Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur;
- c) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur;
- d) Pelaksanaan evaluasi laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan rencana perangkat daerah Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur;
- e) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan daerah dan penyusunan rencana perangkat daerah Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur;
- f) Pengoordinasian, sinkronisasi, penatausahaan, dan pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur;
- g) Pemberian dan penerbitan rekomendasi regulasi dan kebijakan Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur;
- h) Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja serta Anggaran Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur;
- i) Pengelolaan kepegawaian dengan merumuskan, memeriksa dan menetapkan penilaian kerja bawahan

berdasarkan hasil kerja yang dicapai Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur;

j) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas fungsi Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur; dan

k) Pelaksanaan tugas lain yang terkait fungsi Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur.

f. Bidang Riset dan Inovasi Daerah

Bidang Riset dan Inovasi Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah mempunyai tugas penyelenggaraan koordinasi Riset dan Inovasi Daerah di Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Sosial dan Kependudukan, Ekonomi dan Pembangunan, Inovasi dan Teknologi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah melaksanakan fungsi sebagai berikut:

a) Penyusunan dan pelaksanaan verifikasi Rencana Strategis dan Rencana Kerja Badan Bidang Riset dan Inovasi Daerah;

b) Penyusunan dan verifikasi Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah;

c) Pelaksanaan, penyusunan, penyampaian laporan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Badan Bidang Riset dan Inovasi Daerah;

d) Penyiapan bahan pelaksanaan Riset dan Inovasi Daerah Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Sosial dan Kependudukan, Ekonomi dan Pembangunan, Inovasi dan Teknologi;

e) Perumusan kebijakan, serta melakukan fasilitasi kegiatan Riset dan Inovasi Daerah di Bidang

Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Sosial dan Kependudukan, Ekonomi dan Pembangunan, Inovasi dan Teknologi;

- f) Pengelolaan data dan informasi Riset dan Inovasi Daerah, menyediakan sistem informasi dan pengembangan daerah serta pelaksanaan publikasi hasil-hasil Riset dan Inovasi Daerah di Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Sosial dan Kependudukan, Ekonomi dan Pembangunan, Inovasi dan Teknologi;
- g) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Riset dan Inovasi Daerah Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Sosial dan Kependudukan, Ekonomi dan Pembangunan, Inovasi dan Teknologi;
- h) Pemberian dan penerbitan rekomendasi regulasi dan kebijakan Riset dan Inovasi Daerah di Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Sosial dan Kependudukan, Ekonomi dan Pembangunan, Inovasi dan Teknologi;
- i) Pengoordinasian, sinkronisasi, penatausahaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan di Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
- j) Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran serta pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan Riset dan Inovasi Daerah Bidang Riset dan Inovasi Daerah Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Sosial dan Kependudukan, Ekonomi dan Pembangunan, Inovasi dan Teknologi;
- k) Pengelolaan kepegawaian dengan merumuskan, memeriksa dan menetapkan penilaian kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
- l) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas fungsi Bidang Riset dan Inovasi Daerah; dan
- m) Pelaksanaan tugas lain yang terkait fungsi Bidang Riset dan Inovasi Daerah.

g. Kelompok Jabatan

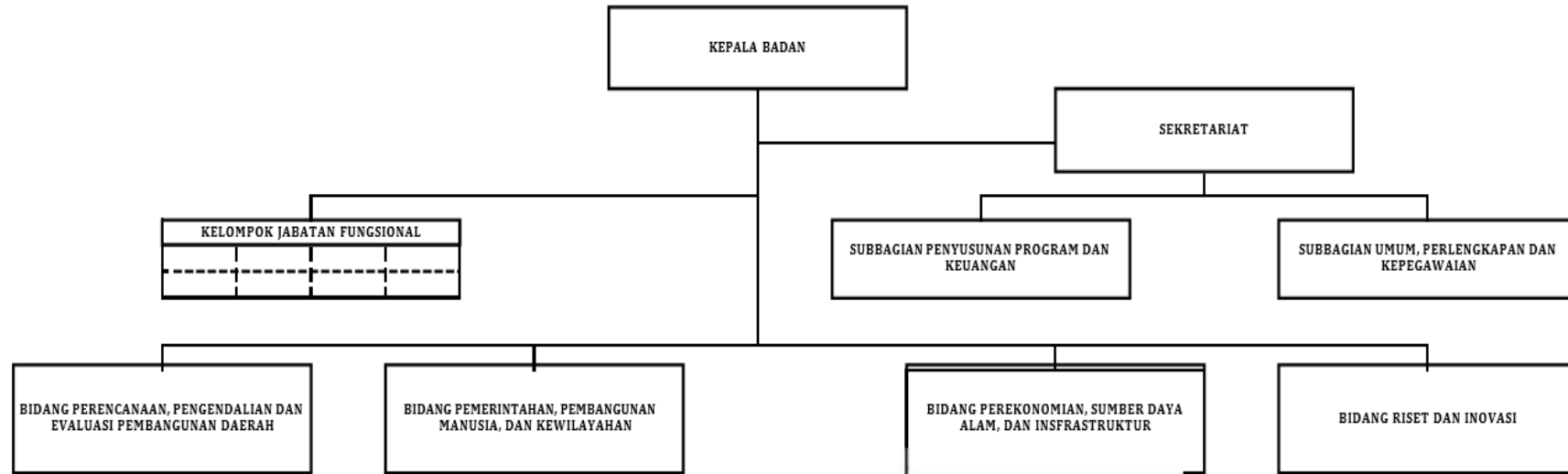
1) Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Administrator sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri atas berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tugas, jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Jabatan Fungsional masing-masing.

2) Jabatan Pelaksana

Setiap Aparatur Sipil Negara yang belum menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional ditetapkan dalam Jabatan Pelaksana. Penetapan Jabatan dan Uraian Tugas Pelaksana ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN SERUYAN**



1.5. Sistematika Penulisan

Perjanjian Kinerja (PK) Bapperida Kabupaten Seruyan Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang, Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan, Struktur Organisasi, dan Sistematika Penulisan.

Bab II. Perencanaan Kinerja, memuat Perencanaan dan Perjanjian Kinerja yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2026.

Bab III. Penutup

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja yang sudah ditetapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Seruyan untuk dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2026 adalah sebagaimana Tabel berikut ini.

Tabel 2.1 Penetapan Perencanaan Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	63	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
						Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
						Fasilitasi Kunjungan Tamu
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai Komponen SAKIP (Perencanaan Kinerja)	22	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Pelaksanaan Konsultasi Publik
3	Meningkatnya Kinerja Pembangunan Daerah	Persentase Target Kinerja Pembangunan Daerah yang Tercapai	100%			Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
						Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
						Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan
						Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
					Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
						Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah
					Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
						Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
				Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
						Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
						Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
						Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
						Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
						Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
						Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
					Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
						Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
						Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
						Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
						Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
						Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
						Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
					Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
						Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
						Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
						Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
						Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
						Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
						Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan
4	Meningkatnya Kualitas Riset dan Inovasi Daerah	Persentase Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi	100%	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
				Program Riset dan Inovasi Daerah	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Koordinasi Sistem Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah
					Invensi dan Inovasi	Fasilitasi dan Pembinaan Untuk Peningkatan Difusi Inovasi
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Invensi dan Inovasi



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : AGUNG SETIAWAN, S.STP., M.Si

Jabatan : Kepala Bapperida Kabupaten Seruyan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AHMAD SELANORWANDA, S.E., M.Si.

Jabatan : Bupati Seruyan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

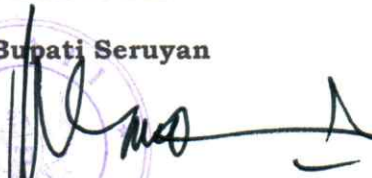
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, 20 Februari 2026

Pihak Kedua

Bupati Seruyan



AHMAD SELANORWANDA, S.E., M.Si

Pihak Pertama

Kepala Bapperida
Kabupaten Seruyan



AGUNG SETIAWAN, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19790920 199810 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	63
2	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai Komponen SAKIP (Perencanaan Kinerja)	22
3	Meningkatnya Kinerja Pembangunan Daerah	Persentase Target Kinerja Pembangunan Daerah yang Tercapai	100%
4	Meningkatnya Kualitas Riset dan Inovasi Daerah	Persentase Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi	100%

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 7.290.640.544,00	APBD
2.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp 713.999.000,00	APBD
3.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 549.126.000,00	APBD
4.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp 50.000.000,00	APBD
5.	Program Riset dan Inovasi Daerah	Rp 632.800.000,00	APBD

Pihak Kedua

Bupati Seruyan

AHMAD SELANORWANDA, S.E., M.Si.

Pihak Pertama

**Kepala Bapperida
Kabupaten Seruyan**

AGUNG SETIAWAN, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19790920 199810 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : IWAN SUMANTRI, SP., M.A.P

Jabatan : Plt. Sekretaris Bapperida Kabupaten Seruyan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AGUNG SETIAWAN, S.STP., M.Si

Jabatan : Kepala Bapperida Kabupaten Seruyan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, 20 Pebruari 2026

Pihak Kedua

Kepala Bapperida
Kabupaten Seruyan



AGUNG SETIAWAN, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19790920 199810 1 001

Pihak Pertama

Plt. Sekretaris Bapperida
Kabupaten Seruyan

IWAN SUMANTRI, SP., M.A.P
Pembina
NIP. 19750928 199902 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
	Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100%
2	Terpenuhinya Unit Kerja yang Memperoleh Pelayanan Administrasi Keuangan	Persentase Unit Kerja yang Memperoleh Pelayanan Administrasi Keuangan	100%
3	Terpenuhinya Unit Kerja yang Memperoleh Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Dokumen
4	Terpenuhinya Pegawai yang Memperoleh Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Persentase Pegawai yang Memperoleh Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%
5	Terpenuhinya Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Umum	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Umum	100%
6	Terpenuhinya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%
7	Terpeliharanya Barang Milik Daerah di Bapperida	Persentase Barang yang Dipelihara terhadap Jumlah Seluruh Aset di Bapperida	100%

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan (APBN/APBD)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.290.640.544,00	APBD
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	51.280.000,00	APBD
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.299.984.558,00	APBD
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.510.000,00	APBD
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	164.614.000,00	APBD
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	671.299.500,00	APBD
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	692.112.486,00	APBD
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	405.840.000,00	APBD

Pihak Kedua

**Kepala Bapperida
Kabupaten Seruyan**

AGUNG SETIAWAN, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19790920 199810 1 001

Pihak Pertama

**Plt. Sekretaris Bapperida
Kabupaten Seruyan**

IWAN SUMANTRI, SP., M.A.P
Pembina
NIP. 19750928 199902 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : SITI SYAIDAH, S.Si

Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah Bapperida Kabupaten Seruyan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AGUNG SETIAWAN, S.STP., M.Si

Jabatan : Kepala Bapperida Kabupaten Seruyan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, 20 Pebruari 2026

Pihak Kedua

Kepala Bapperida
Kabupaten Seruyan



AGUNG SETIAWAN, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19790920 199810 1 001

Pihak Pertama

Kepala Bidang Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah

SITI SYAIDAH, S.Si
Pembina
NIP. 19761115 200604 2 019

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	100%
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan Pembangunan Daerah	2 Dokumen
2	Tersedianya Data dan Informasi Pemerintahan Daerah yang relevan dan mutakhir	Persentase Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang dianalisis	100%
3	Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pembangunan sebagai Rekomendasi Pengambilan Kebijakan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun	5 Laporan

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan (APBN/APBD)
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	713.999.000,00	APBD
1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	461.700.000,00	APBD
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	63.000.000,00	APBD
	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	98.057.000,00	APBD
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	65.952.000,00	APBD
	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	19.226.000,00	APBD
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	215.465.000,00	APBD
2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	64.465.000,00	APBD
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	21.960.000,00	APBD
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	42.505.000,00	APBD
3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	187.834.000,00	APBD
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	105.931.000,00	APBD

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan (APBN/APBD)
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	81.903.000,00	APBD

Pihak Kedua

**Kepala Bapperida
Kabupaten Seruyan**



AGUNG SETIAWAN, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19790920 199810 1 001

Pihak Pertama

**Kepala Bidang Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah**

SITI SYAIDAH, S.Si
Pembina
NIP. 19761115 200604 2 019



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : DEDY HIDAYAT, ST., MM

Jabatan : Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan Bapperida Kabupaten Seruyan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AGUNG SETIAWAN, S.STP., M.Si

Jabatan : Kepala Bapperida Kabupaten Seruyan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, 10 Pebruari 2026

Pihak Kedua

Kepala Bapperida
Kabupaten Seruyan



AGUNG SETIAWAN, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19790920 199810 1 001

Pihak Pertama

Kepala Bidang Pemerintahan,
Pembangunan Manusia dan
Kewilayahan

DEDY HIDAYAT, ST., MM
Pembina
NIP. 19800224 201001 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan RENJA PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan RENJA PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang selaras pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Koordinasi Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%
2	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang selaras pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Koordinasi Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan (APBN/APBD)
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	284.665.000,00	APBD
1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	215.279.000,00	APBD
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	54.992.000,00	APBD
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	5.020.000,00	APBD
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	5.280.000,00	APBD
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	52.021.000,00	APBD
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	30.992.000,00	APBD
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	5.020.000,00	APBD
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	5.280.000,00	APBD
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	56.674.000,00	APBD

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan (APBN/APBD)
2	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	69.386.000,00	APBD
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	30.992.000,00	APBD
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	5.020.000,00	APBD
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	5.280.000,00	APBD
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	28.094.000,00	APBD

Pihak Kedua

**Kepala Bapperida
Kabupaten Seruyan**



AGUNG SETIAWAN, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19790920 199810 1 001

Pihak Pertama

**Kepala Bidang Pemerintahan,
Pembangunan Manusia dan
Kewilayahan**

DEDY HIDAYAT, ST., MM
Pembina
NIP. 19800224 201001 1 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : IWAN SUMANTRI, SP., M.A.P

Jabatan : Kepala Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur
Bapperida Kabupaten Seruyan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AGUNG SETIAWAN, S.STP., M.Si

Jabatan : Kepala Bapperida Kabupaten Seruyan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, 20 Pebruari 2026

Pihak Kedua

Kepala Bapperida
Kabupaten Seruyan

AGUNG SETIAWAN, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19790920 199810 1 001

Pihak Pertama

Kepala Bidang Perekonomian,
SDA dan Infrastruktur

IWAN SUMANTRI, SP., M.A.P
Pembina
NIP. 19750928 199902 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan bidang Perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan RENJA PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	100%
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan RENJA PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang selaras pada Bidang Perekonomian dan SDA	Persentase Koordinasi Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100%
2	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang selaras pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Koordinasi Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan (APBN/APBD)
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	264.461.000,00	APBD
1	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	159.601.000,00	APBD
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	54.992.000,00	APBD
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	5.020.000,00	APBD
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	5.280.000,00	APBD
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	17.706.000,00	APBD
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	30.992.000,00	APBD
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	5.020.000,00	APBD
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	5.280.000,00	APBD
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	35.311.000,00	APBD
2	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	104.860.000,00	APBD
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	30.992.000,00	APBD

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan (APBN/APBD)
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	5.020.000,00	APBD
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	5.280.000,00	APBD
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	63.568.000,00	APBD

Pihak Kedua

**Kepala Bapperida
Kabupaten Seruyan**



AGUNG SETIAWAN, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19790920 199810 1 001

Pihak Pertama

**Kepala Bidang Perekonomian,
SDA dan Infrastruktur**

IWAN SUMANTRI, SP., M.A.P
Pembina
NIP. 19750928 199902 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : EDDY FATAHILLAH, SE., MM

Jabatan : Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah Bapperida
Kabupaten Seruyan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AGUNG SETIAWAN, S.STP., M.Si

Jabatan : Kepala Bapperida Kabupaten Seruyan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, 20 Pebruari 2026

Pihak Kedua

**Kepala Bapperida
Kabupaten Seruyan**



AGUNG SETIAWAN, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19790920 199810 1 001

Pihak Pertama

**Kepala Bidang Riset dan Inovasi
Daerah**

EDDY FATAHILLAH, SE., MM
Pembina
NIP. 19820320 200903 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dalam Perencanaan Pembangunan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai Landasan Dalam Implementasi Pembangunan	100%
	Meningkatnya Kajian yang Termanfaatkan sebagai Kebijakan Pembangunan Daerah dalam Pengembangan Potensi Unggulan	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	100%
	Meningkatnya Kajian yang Termanfaatkan sebagai Kebijakan Pembangunan Daerah dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	100%
	Meningkatnya Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah	100%
1	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	1 Dokumen
	Meningkatnya Pemanfaatan Inovasi Daerah dalam Pembangunan	Persentase Produk Inovasi yang dimanfaatkan	100%
	Meningkatnya Kajian yang Termanfaatkan sebagai Kebijakan Pembangunan Daerah dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	100%
	Meningkatnya Kajian yang Termanfaatkan sebagai Kebijakan Pembangunan Daerah dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah	100%
	Meningkatnya Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah	100%
2	Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	1 Dokumen
3	Meningkatnya Invensi dan Inovasi Baru yang dihasilkan	Jumlah Invensi dan Inovasi yang dihasilkan	10 Inovasi

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan (APBN/APBD)
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	50.000.000,00	APBD
1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	50.000.000,00	APBD
	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	50.000.000,00	APBD
	Program Riset dan Inovasi Daerah	632.800.000,00	APBD
2	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	607.800.000,00	APBD

	Koordinasi Sistem Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah	607.800.000,00	APBD
3	Invensi dan Inovasi	25.000.000,00	APBD
	Fasilitasi dan Pembinaan Untuk Peningkatan Difusi Inovasi	12.000.000,00	APBD
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Invensi dan Inovasi	13.000.000,00	APBD

Pihak Kedua

**Kepala Bapperida
Kabupaten Seruyan**



AGUNG SETIAWAN, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19790920 199810 1 001

Pihak Pertama

**Kepala Bidang Riset dan Inovasi
Daerah**

EDDY FATAHILLAH, SE., MM
Pembina
NIP. 19820320 200903 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : MENTENG DELPRIS, S.IP., M.A.P
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian
Bapperida Kabupaten Seruyan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : IWAN SUMANTRI, SP., M.A.P
Jabatan : Plt. Sekretaris Bapperida Kabupaten Seruyan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, 20 Pebruari 2026

Pihak Kedua

Plt. Sekretaris Bapperida
Kabupaten Seruyan

IWAN SUMANTRI, SP., M.A.P
Pembina
NIP. 19750928 199902 1 001

Pihak Pertama

Kepala Sub Bagian Umum,
Perlengkapan dan Kepegawaian

MENTENG DELPRIS, S.IP., M.A.P
Penata
NIP. 19811113 201212 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan
2	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	72 Paket
3	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang
4	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang
5	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	18 Paket
6	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	68 Paket
7	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket
8	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket
9	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket
10	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen
11	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan
12	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Laporan
13	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
14	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
15	Terpeliharanya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit
16	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit
17	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
18	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan (APBN/APBD)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.939.375.986,00	APBD
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.510.000,00	APBD
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.510.000,00	APBD
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	164.614.000,00	APBD
2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	76.590.000,00	APBD
3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	44.366.000,00	APBD
4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	43.658.000,00	APBD
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	671.299.500,00	APBD
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.576.000,00	APBD
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	113.879.500,00	APBD
7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.384.000,00	APBD
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	170.745.000,00	APBD
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	38.750.000,00	APBD
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.150.000,00	APBD
11	Fasilitasi Kunjungan Tamu	17.464.000,00	APBD
12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	302.351.000,00	APBD
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	692.112.486,00	APBD
13	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	223.388.750,00	APBD
14	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	468.723.736,00	APBD
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	405.840.000,00	APBD
15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	76.680.000,00	APBD
16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	221.050.000,00	APBD

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan (APBN/APBD)
17	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.910.000,00	APBD
18	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	47.200.000,00	APBD

Pihak Kedua

**Plt. Sekretaris Bapperida
Kabupaten Seruyan**



IWAN SUMANTRI, SP., M.A.P
Pembina
NIP. 19750928 199902 1 001

Pihak Pertama

**Kepala Sub Bagian Umum,
Perlengkapan dan Kepegawaian**



MENTENG DELPRIS, S.IP., M.A.P
Penata
NIP. 19811113 201212 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : YUNITA, SE., M.A.P

Jabatan : Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
Bapperida Kabupaten Seruyan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : IWAN SUMANTRI, SP., M.A.P

Jabatan : Plt. Sekretaris Bapperida Kabupaten Seruyan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, 20 Pebruari 2026

Pihak Kedua

Plt. Sekretaris Bapperida
Kabupaten Seruyan

IWAN SUMANTRI, SP., M.A.P
Pembina
NIP. 19750928 199902 1 001

Pihak Pertama

Kepala Sub Bagian Penyusunan
Program dan Keuangan

YUNITA, SE., M.A.P
Penata
NIP. 19800807 200701 2 010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan
2	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 Orang/ Bulan
3	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen
4	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan

Pihak Kedua

**Plt. Sekretaris Bapperida
Kabupaten Seruyan**


IWAN SUMANTRI, SP., M.A.P
Pembina
NIP. 19750928 199902 1 001

Pihak Pertama

**Kepala Sub Bagian Penyusunan
Program dan Keuangan**


YUNITA, SE., M.A.P
Penata
NIP. 19800807 200701 2 010



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : DESY TRIANA, ST

Jabatan : Perencana Ahli Muda Bapperida Kabupaten Seruyan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : IWAN SUMANTRI, SP., M.A.P

Jabatan : Plt. Sekretaris Bapperida Kabupaten Seruyan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, 20 Pebruari 2026

Pihak Kedua

**Plt. Sekretaris Bapperida
Kabupaten Seruyan**

IWAN SUMANTRI, SP., M.A.P
Pembina
NIP. 19750928 199902 1 001

Pihak Pertama

Perencana Ahli Muda

DESY TRIANA, ST
Penata
NIP. 19910303 201503 2 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen
2	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen
3	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen
4	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen
5	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen
6	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan

Pihak Kedua

**Plt. Sekretaris Bapperida
Kabupaten Seruyan**



IWAN SUMANTRI, SP., M.A.P
Pembina
NIP. 19750928 199902 1 001

Pihak Pertama

Perencana Ahli Muda



DESY TRIANA, ST
Penata
NIP. 19910303 201503 2 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : SUPARMAN, SE

Jabatan : Perencana Ahli Muda pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SITI SYAIDAH, S.Si

Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bapperida Kabupaten Seruyan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, 20 Pebruari 2026

Pihak Kedua

**Kepala Bidang Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah**

**SITI SYAIDAH, S.Si
Pembina**

NIP. 19761115 200604 2 019

Pihak Pertama

Perencana Ahli Muda

**SUPARMAN, SE
Penata Tk. I**

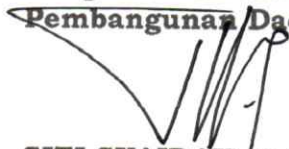
NIP. 19820511 201001 1 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Tersusunnya Dokumen Rancangan Awal RKPD	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara
2	Tersusunnya Dokumen Rancangan RKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara
3	Tersusunnya Dokumen Rancangan Akhir RKPD	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara
4	Tersedianya Usulan-Usulan yang Telah Terverifikasi oleh Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	1000 Usulan
5	Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen

Pihak Kedua

**Kepala Bidang Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah**



SITI SYAIDAH, S.Si

Pembina

NIP. 19761115 200604 2 019

Pihak Pertama

Perencana Ahli Muda



SUPARMAN, SE

Penata Tk. I

NIP. 19820511 201001 1 008



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : HAIRA ABDAH, S.Hi

Jabatan : Perencana Ahli Muda pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SITI SYAIDAH, S.Si

Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bapperida Kabupaten Seruyan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, 20 Pebruari 2026

Pihak Kedua

Kepala Bidang Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah

SITI SYAIDAH, S.Si

Pembina

NIP. 19761115 200604 2 019

Pihak Pertama

Perencana Ahli Muda

HAIRA ABDAH, S.Hi

Penata Tk. I

NIP. 19830201 201001 2 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen
2	Terbinanya Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	23 Orang

Pihak Kedua

**Kepala Bidang Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah**

SITI SYAIDAH, S.Si
Pembina
NIP. 19761115 200604 2 019

Pihak Pertama

Perencana Ahli Muda



HAIRA ABDAH, S.Hi
Penata Tk. I
NIP. 19830201 201001 2 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : NURUL IZZATI, SE

Jabatan : Perencana Ahli Muda pada Bidang Pemerintahan,
Pembangunan Manusia dan Kewilayahan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : DEDY HIDAYAT, ST., MM

Jabatan : Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan
Kewilayahan Bapperida Kabupaten Seruyan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

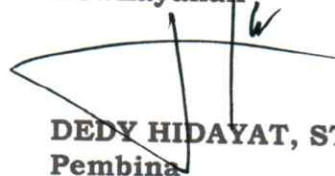
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, 20 Februari 2026

Pihak Kedua

Kepala Bidang Pemerintahan,
Pembangunan Manusia dan
Kewilayahan



DEDY HIDAYAT, ST., MM
Pembina
NIP. 19800224 201001 1 005

Pihak Pertama

Perencana Ahli Muda



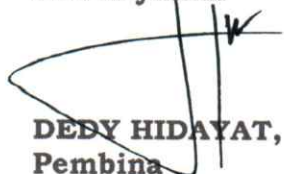
NURUL IZZATI, SE
Penata Tk. I
NIP. 19810130 200903 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen
2	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan sesuai kaidah aturan yang berlaku	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	9 Laporan
3	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan sesuai kaidah aturan yang berlaku	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	2 Laporan
4	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan

Pihak Kedua

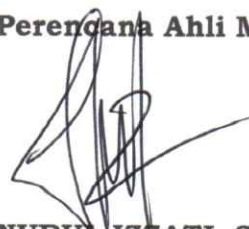
**Kepala Bidang Pemerintahan,
Pembangunan Manusia dan
Kewilayahan**



DEDY HIDAYAT, ST., MM
Pembina
NIP. 19800224 201001 1 005

Pihak Pertama

Perencana Ahli Muda



NURUL IZZATI, SE
Penata Tk. I
NIP. 19810130 200903 2 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ARI FEBRI SETIAWAN, S.Sos

Jabatan : Perencana Ahli Pertama pada Bidang Pemerintahan,
Pembangunan Manusia dan Kewilayahan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : DEDY HIDAYAT, ST., MM

Jabatan : Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan
Kewilayahan Bapperida Kabupaten Seruyan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

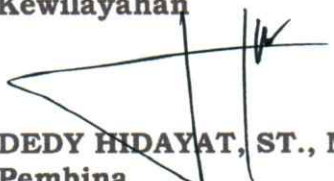
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, 20 Februari 2026

Pihak Kedua

Kepala Bidang Pemerintahan,
Pembangunan Manusia dan
Kewilayahan


DEDY HIDAYAT, ST., MM
Pembina
NIP. 19800224 201001 1 005

Pihak Pertama

Perencana Ahli Pertama

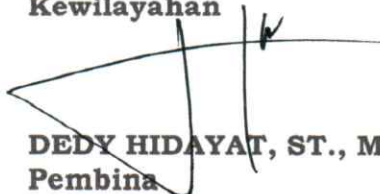

ARI FEBRI SETIAWAN, S.Sos
Penata Muda
NIP. 19950215 202505 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen
2	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia sesuai kaidah aturan yang berlaku	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	9 Laporan
3	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia sesuai kaidah aturan yang berlaku	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan
4	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan

Pihak Kedua

**Kepala Bidang Pemerintahan,
Pembangunan Manusia dan
Kewilayahan**



DEDY HIDAYAT, ST., MM
Pembina
NIP. 19800224 201001 1 005

Pihak Pertama

Perencana Ahli Pertama



ARI FEBRI SETIAWAN, S.Sos
Penata Muda
NIP. 19950215 202505 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : DODY SUFIANOOR, S.Sos., M.A.P
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : DEDY HIDAYAT, ST., MM
Jabatan : Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan Bapperida Kabupaten Seruyan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

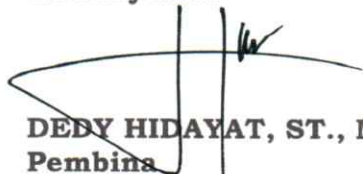
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, 20 Februari 2026

Pihak Kedua

Kepala Bidang Pemerintahan,
Pembangunan Manusia dan
Kewilayahan



DEDY HIDAYAT, ST., MM
Pembina
NIP. 19800224 201001 1 005

Pihak Pertama

Analisis Kebijakan Ahli Muda



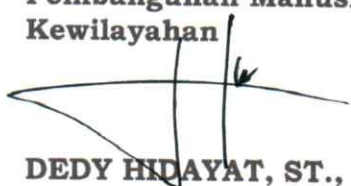
DODY SUFIANOOR, S.Sos., M.A.P
Penata Tk. I
NIP. 19740228 200501 1 010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen
2	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan sesuai kaidah aturan yang berlaku	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	10 Laporan
3	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan sesuai kaidah aturan yang berlaku	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	2 Laporan
4	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan

Pihak Kedua

**Kepala Bidang Pemerintahan,
Pembangunan Manusia dan
Kewilayahan**



DEDY HIDAYAT, ST., MM
Pembina
NIP. 19800224 201001 1 005

Pihak Pertama

Analisis Kebijakan Ahli Muda



DODY SUFIANOOR, S.Sos., M.A.P
Penata Tk. I
NIP. 19740228 200501 1 010



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : SURIWATI, S.Sos

Jabatan : Perencana Ahli Muda pada Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : IWAN SUMANTRI, SP., M.A.P

Jabatan : Kepala Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur
Bapperida Kabupaten Seruyan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, 20 Pebruari 2026

Pihak Kedua

**Kepala Bidang Perekonomian, SDA
dan Infrastruktur**

IWAN SUMANTRI, SP., M.A.P
Pembina
NIP. 19750928 199902 1 001

Pihak Pertama

Perencana Ahli Muda

SURIWATI, S.Sos
Penata Tk. I
NIP. 19770206 201001 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen
2	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian sesuai kaidah aturan yang berlaku	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	3 Laporan
3	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian sesuai kaidah aturan yang berlaku	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	3 Laporan
4	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan

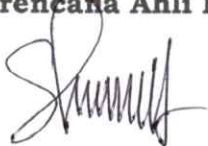
Pihak Kedua

Kepala Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur


IWAN SUMANTRI, SP., M.A.P
Pembina
NIP. 19750928 199902 1 001

Pihak Pertama

Perencana Ahli Muda


SURIWATI, S.Sos
Penata Tk. I
NIP. 19770206 201001 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : NIDYA STELLA LARA, S.Sos

Jabatan : Perencana Ahli Muda pada Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : IWAN SUMANTRI, SP., M.A.P

Jabatan : Kepala Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur
Bapperida Kabupaten Seruyan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, 20 Pebruari 2026

Pihak Kedua

Kepala Bidang Perekonomian, SDA
dan Infrastruktur

IWAN SUMANTRI, SP., M.A.P
Pembina
NIP. 19750928 199902 1 001

Pihak Pertama

Perencana Ahli Muda

NIDYA STELLA LARA, S.Sos
Penata
NIP. 19801119 200701 2 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen
2	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA sesuai kaidah aturan yang berlaku	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	5 Laporan
3	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA sesuai kaidah aturan yang berlaku	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	5 Laporan
4	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan

Pihak Kedua

Kepala Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur


IWAN SUMANTRI, SP., M.A.P
Pembina
NIP. 19750928 199902 1 001

Pihak Pertama

Perencana Ahli Muda


NIDYA STELLA LARA, S.Sos
Penata
NIP. 19801119 200701 2 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : BUDI DWI PRAMONO, ST

Jabatan : Perencana Ahli Muda pada Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : IWAN SUMANTRI, SP., M.A.P

Jabatan : Kepala Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur
Bapperida Kabupaten Seruyan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, 20 Pebruari 2026

Pihak Kedua

Kepala Bidang Perekonomian, SDA
dan Infrastruktur

IWAN SUMANTRI, SP., M.A.P
Pembina
NIP. 19750928 199902 1 001

Pihak Pertama

Perencana Ahli Muda

BUDI DWI PRAMONO, ST
Penata Tk. I
NIP. 19770422 201001 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen
2	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur sesuai kaidah aturan yang berlaku	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	4 Laporan
3	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur sesuai kaidah aturan yang berlaku	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	4 Laporan
4	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan

Pihak Kedua

Kepala Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur



IWAN SUMANTRI, SP., M.A.P
Pembina
NIP. 19750928 199902 1 001

Pihak Pertama

Perencana Ahli Muda



BUDI DWI PRAMONO, ST
Penata Tk. I
NIP. 19770422 201001 1 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : MUTHMAINNAH, SE., MM

Jabatan : Peneliti Ahli Muda pada Bidang Riset dan Inovasi Daerah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : EDDY FATAHILLAH, SE., MM

Jabatan : Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah
Bapperida Kabupaten Seruyan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, 2^o Pebruari 2026

Pihak Kedua

Kepala Bidang Riset dan Inovasi
Daerah

EDDY FATAHILLAH, SE., MM
Pembina
NIP. 19820320 200903 1 003

Pihak Pertama

Peneliti Ahli Muda

MUTHMAINNAH, SE., MM
Pembina
NIP. 19790831 200903 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terlaksananya Koordinasi Sistem Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah untuk Menghasilkan Dokumen Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi Sistem Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah Dalam Bentuk Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah	2 Dokumen
2	Terlaksananya Fasilitasi dan Pembinaan untuk Peningkatan Difusi Inovasi	Jumlah Laporan Fasilitasi dan Pembinaan untuk Peningkatan Difusi Inovasi	1 Laporan
3	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Inovasi dan Inovasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Inovasi dan Inovasi	1 Laporan

Pihak Kedua

Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah



EDDY FATAHILLAH, SE., MM
Pembina
NIP. 19820320 200903 1 003

Pihak Pertama

Peneliti Ahli Muda



MUTHMAINNAH, SE., MM
Pembina
NIP. 19790831 200903 2 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : HANILANSYAH, ST

Jabatan : Peneliti Ahli Muda pada Bidang Riset dan Inovasi Daerah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : EDDY FATAHILLAH, SE., MM

Jabatan : Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah
Bapperida Kabupaten Seruyan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, 20 Pebruari 2026

Pihak Kedua

Kepala Bidang Riset dan Inovasi
Daerah

EDDY FATAHILLAH, SE., MM
Pembina
NIP. 19820320 200903 1 003

Pihak Pertama

Peneliti Ahli Muda

HANILANSYAH, ST
Penata Tk. I
NIP. 19771204 201101 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terlaksananya Koordinasi Sistem Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah untuk Menghasilkan Dokumen Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi Sistem Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah Dalam Bentuk Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah	1 Dokumen

Pihak Kedua

Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah



EDDY FATAHILLAH, SE., MM
Pembina
NIP. 19820320 200903 1 003

Pihak Pertama

Peneliti Ahli Muda



HANILIANSYAH, ST
Penata Tk. I
NIP. 19771204 201101 1 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : MIFTAH RIFA'I, SE

Jabatan : Peneliti Ahli Muda pada Bidang Riset dan Inovasi Daerah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : EDDY FATAHILLAH, SE., MM

Jabatan : Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah
Bapperida Kabupaten Seruyan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, 20 Pebruari 2026

Pihak Kedua

**Kepala Bidang Riset dan Inovasi
Daerah**

EDDY FATAHILLAH, SE., MM
Pembina
NIP. 19820320 200903 1 003

Pihak Pertama

Peneliti Ahli Muda

MIFTAH RIFA'I
Penata
NIP. 19710822 201212 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen

Pihak Kedua

**Kepala Bidang Riset dan Inovasi
Daerah**



EDDY FATAHILLAH, SE., MM
Pembina
NIP. 19820320 200903 1 003

Pihak Pertama

Peneliti Ahli Muda

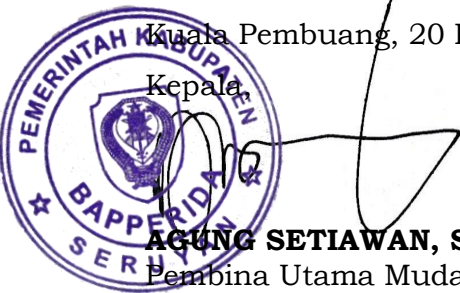
MIFTAH RIFA'I
Penata
NIP. 19710822 201212 1 002

BAB III

PENUTUP

Perjanjian Kinerja Bapperida Kabupaten Seruyan adalah 1 (satu) perwujudan perjanjian kerja yang akan dilaksanakan dalam satu tahun berjalan yang telah digariskan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran sampai dengan sub kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi Perangkat Daerah untuk mencapainya dalam satu periode tahunan. Bapperida Kabupaten Seruyan pada tahun 2026 melaksanakan 5 program, 16 Kegiatan dan 64 Sub Kegiatan. Adapun 5 program tersebut adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, Program Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Program Riset dan Inovasi Daerah.

Semoga Perjanjian Kinerja ini dapat bermanfaat bagi Bapperida Kabupaten Seruyan khususnya dan Pemerintah Kabupaten Seruyan pada umumnya dalam memberikan informasi mengenai rencana maupun target kinerja tahunan yang akan dicapai.

Kuala Pembuang, 20 Pebruari 2026
Kepala

AGUNG SETIAWAN, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19790920 199810 1 001